

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sistem negara demokrasi, kepentingan umum selalu diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Demokrasi sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang menetapkan kebijakan berdasarkan suara mayoritas rakyat yang memiliki hak pilih, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui proses pemilihan. Ketika berbicara tentang kehendak rakyat, demokrasi juga dimaknai sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis berperan dalam mewujudkan kebaikan bersama melalui kontrak politik. Hal ini erat kaitannya dengan sistem politik demokrasi yang sangat lekat dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu maupun pilkada dijalankan berdasarkan asas LUBEJURDIL, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹

Demokrasi yang sehat tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan pemilu semata, tetapi juga pada kualitas dari proses dan hasilnya. Pemilu yang berintegritas mencerminkan kedewasaan politik warga negara serta kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.² Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai demokrasi tersebut seringkali dikompromikan oleh tindakan-tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum, seperti praktik politik uang (*money politics*). *Money politics* merupakan bentuk manipulasi politik yang mengancam esensi demokrasi itu sendiri, karena mendorong

¹ Edi Sofwan, dkk, *Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol. 2 No. 1 Mei 2021. Diakses Dalam <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/4296> (8 Mei 2023, 18.06 WIB)

² Nur Hidayat Sardini, "Restorasi Penyelenggaraan PEMILU Di Indonesia" (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), <https://eprints.undip.ac.id/57757/>.

warga memilih bukan berdasarkan gagasan, visi-misi, atau kapasitas calon, tetapi karena adanya iming-iming material.³

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai salah satu lembaga negara dibentuk sebagai respons atas krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan ini mulai muncul sejak tahun 1971, ketika kekuatan rezim penguasa mulai melakukan kooptasi terhadap sistem pemilu. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai cara yang digunakan untuk memperoleh suara rakyat, salah satunya adalah praktik politik uang (*money politic*). Kegiatan ini umumnya terjadi menjelang hari pelaksanaan pemilu, baik pada malam sebelum pemilihan maupun pagi harinya.⁴

Keberadaan BAWASLU menjadi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan menekan angka pelanggaran pemilu. Dalam konteks lokal seperti Kota Probolinggo, tantangan pelanggaran pemilu tidak hanya datang dari aktor politik semata, tetapi juga dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya politik uang.⁵ Fenomena ini menuntut strategi pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pengawasan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan komunikatif yang mampu mengubah pola pikir masyarakat.

Pemilihan Umum adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam ranah pemerintahan. Melalui proses ini, masyarakat secara aktif diberi kesempatan untuk memilih dan menetapkan siapa yang layak memegang kendali pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut erat kaitannya dengan

³ Muchlisin Riadi, "Politik Uang / *Money politic* (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk Dan Strategi)," Kajianpustaka.com, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>.

⁴ Nabila Amrie Afina, *Peran Banwaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori AL-HISBAH*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Diakses Dalam <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/8755> (8 Mei 2023, 18.15 WIB)

⁵ M Rofiq, "Bawaslu Probolinggo Tangkap Timses Caleg Yang Bagi-Bagi Minyak Goreng," detikNews, n.d., <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4513323/bawaslu-probolinggo-tangkap-timses-caleg-yang-bagi-bagi-minyak-goreng>.

kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan sebenarnya berada di tangan rakyat. Dalam hal ini penyerahan sebagian kedaulatan itu dilalui dalam prosesi pemilu. Namun, di era sekarang, muncul persoalan krusial dalam proses penyerahan sebagian kedaulatan rakyat melalui pemilu, yakni terjadinya praktik transaksional yang dikenal dengan istilah politik uang atau jual beli suara (*money politic*).⁶

Kondisi ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemilu yang bersih, serta perlunya strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran publik. Media massa, khususnya media audio-visual, terbukti menjadi sarana paling efektif dalam menyampaikan pesan kampanye sosial karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) menjadi pilihan yang strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari politik uang.⁷

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan yang cukup menarik bagi Bawaslu Kota Probolinggo. Bawaslu Kota Probolinggo melalui kelompok mahasiswa UMM program studi Ilmu Komunikasi bekerja sama dalam upaya merancang dan membuat sebuah Iklan Layanan Masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat warga Kota Probolinggo untuk mewaspadaai adanya tindakan *money politics* atau jual beli suara di lingkungan masyarakat.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan dalam pencegahan politik uang merupakan langkah positif yang mencerminkan semangat partisipasi dan inovasi. Dalam kerja sama ini, pendekatan *client-centered* menjadi

⁶ Moch Edward Trias Pahlevi & Azka Abdi Amrurrobbi, *Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, Jurnal Antikorupsi 6 (1). Diakses dalam <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611> (09 Mei 2023, 17.29 WIB)

⁷ Naima Khoiru Nisa, "Strategi Kreatif Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Dalam Pemasaran Sosial," *Jurnal Interaksi* 4, no. 2 (2015): 158–64, <https://doi.org/10.14710/interaksi.4.2.158-164>.

landasan utama dalam proses produksi. Artinya, kebutuhan dan pesan dari BAWASLU sebagai klien menjadi titik fokus utama yang harus diterjemahkan secara kreatif oleh tim produksi, khususnya oleh produser. Peran produser dalam hal ini sangat penting untuk menjembatani kebutuhan klien dengan realisasi visual yang komunikatif dan berdampak.⁸

Di iklan ini penulis dan tim mengambil beberapa shot di pusat kota Probolinggo yang memiliki integritas tinggi dan terus berkembang secara inovasi sehingga sangat cocok untuk berinovasi melalui Iklan Layanan Masyarakat. Di sisi lain, Iklan Layanan Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai waspada tindakan jual beli suara atau *money politics* yang seringkali terjadi saat pemilihan umum akan berlangsung.

Pemilihan lokasi syuting di pusat kota Probolinggo juga memiliki nilai simbolik, yakni menggambarkan semangat perubahan dan kemajuan masyarakat urban yang sadar akan pentingnya integritas dalam pemilu. Visualisasi yang kuat dari lokasi ini dapat memperkuat pesan moral dalam iklan tersebut. Selain itu, proses produksi ILM ini tidak hanya menghasilkan karya visual, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komunikasi BAWASLU dalam membangun narasi bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menolak politik uang.

Analisis Situasi (*Fact Finding*)

Mengingat saat ini mendekati pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024, para caleg pun sudah mulai bersiap-siap untuk ikut mendaftarkan dirinya pada KPU. Bawaslu Kota Probolinggo pun juga sibuk dengan mengawasi serangkaian tahapan menuju pemilu 2024. Tidak hanya mengawasi pemilu, Bawaslu juga tengah sibuk memberikan Sosialisasi kepada masyarakat agar berkurangnya kasus-kasus

⁸ Heru Effendy, *Mari Membuat Film* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

pelanggaran yang terjadi di Kota Probolinggo. Seperti adanya dugaan pelanggaran *Money politic*, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran lainnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Probolinggo menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalankan fungsinya menjelang pemilu 2024. Selain menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab edukatif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Strategi sosialisasi yang dilakukan pun tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti seminar atau brosur, mengingat pola konsumsi informasi masyarakat telah banyak berubah. Generasi saat ini lebih responsif terhadap pesan-pesan visual yang singkat, padat, dan emosional — seperti yang disajikan dalam iklan layanan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pada media visual menjadi salah satu cara efektif untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama kalangan muda dan masyarakat urban.

Selain itu, meningkatnya tensi politik menjelang pemilu biasanya diiringi pula dengan praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum pemilu, terutama politik uang. Oleh karena itu, peran pencegahan menjadi semakin penting, dan iklan layanan masyarakat diharapkan dapat menjadi alat bantu strategis untuk menanamkan nilai anti-korupsi serta memperkuat ketahanan moral masyarakat terhadap bujuk rayu politik transaksional.

Alasan Mengapa TA Harus Dilakukan ?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Bawaslu Kota Probolinggo tengah sibuk melakukan sosialisasi dengan beberapa instalasi dan melakukan MoU dengan beberapa organisasi di Kota Probolinggo untuk menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu 2024, dengan adanya karya tugas akhir ini, tidak hanya kalangan orang-orang telpelajar yang

bias tereduksi, namun kasus-kasus pelanggaran yang berada di daerah pelosok juga bias dikurangi. Dengan perkembangan zaman yang cukup pesat, pilihan media *Audio Visual* dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat adalah media yang sangat tepat untuk Masyarakat Kota Probolinggo. Pada saat ini, tidak hanya generasi muda aja yang menggunakan *Smartphone* tetapi juga orang tua bahkan hamper semua kalangan. Selain itu, iklan sendiri memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di dalam buku **Rendra Widyatama (2005:147)** menjelaskan bawasanya ada empat fungsi iklan, yaitu:

1. Fungsi Precipitation

Iklan memiliki peran dalam mempercepat perubahan kondisi dari yang awalnya belum mampu membuat keputusan menjadi bisa mengambil keputusan. Misalnya, iklan dapat menciptakan kesadaran, menambah pengetahuan, serta mendorong peningkatan permintaan terhadap suatu produk.

2. Fungsi Persuasion

Peran iklan juga terletak pada kemampuannya dalam menggugah audiens sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ini mencakup penyampaian informasi mengenai karakteristik produk, membangkitkan emosi, serta membujuk calon konsumen untuk melakukan pembelian.

3. Fungsi Reminder

Iklan berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas kembali kesadaran konsumen terhadap produk yang telah dikenalkan sebelumnya, sehingga tetap tertanam dalam ingatan masyarakat.

Tugas akhir ini menjadi relevan karena mampu mengisi celah kebutuhan informasi yang berorientasi pada pencegahan. Dalam konteks komunikasi massa, ILM tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi, mengajak, dan

mempengaruhi cara berpikir audiens agar berubah ke arah yang lebih baik. Dengan pendekatan client-centered, produser dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai teknisi produksi, tetapi juga sebagai komunikator strategis yang mampu menerjemahkan kebutuhan klien (BAWASLU) ke dalam narasi visual yang mampu menggugah kesadaran publik. Ini menjadi tantangan sekaligus ruang aktualisasi yang penting untuk dikaji secara akademik.

I.2 TUJUAN

Adanya tujuan yang ingin direalisasikan oleh sutradara dalam produk iklan layanan masyarakat ini ialah:

1. Mencegah terjadinya *money politic* di Kota Probolinggo.
2. Membuat materi yang digunakan BAWASLU sesuai dengan UU.

I.3 MANFAAT

Dari produksi Iklan Layanan Masyarakat ini, sutradara berharap bias memberikan beberapa manfaat kepada beberapa pihak dan lembaga yang berkaitan dengan produksi Iklan Layanan Masyarakat ini. Manfaat yang didapat dari produksi ini sebagai berikut :

1. Bagi Bawaslu Kota Probolinggo

Diharapkan bisa menjadi bahan atau materi yang nantinya disosialisasikan ke media-media dan seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Iklan ini dapat menambah variasi media kampanye yang edukatif dan menarik, serta memperkuat peran BAWASLU sebagai lembaga yang progresif dalam memanfaatkan media.

2. Bagi Masyarakat Kota Probolinggo

Diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait bahayanya terlibat dalam *money politic* pada pemilu 2024. Dengan visual yang dekat dengan keseharian

masyarakat, iklan ini diharapkan mampu mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat secara nyata.

3. Bagi Praktisi

Diharapkan tugas akhir ini bisa menjadi referensi bagi para pengkarya dalam membuat karya terkait pemilu, khususnya tema *money politic*. Selain sebagai sumber inspirasi, karya ini juga bisa menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara lembaga dan akademisi dapat menghasilkan produk komunikasi yang berdampak.

4. Bagi Akademik

Diharapkan tugas akhir ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin membuat karya tugas akhir khususnya pada tema pemilu dan komunikasi politik. Skripsi ini juga memperkaya khazanah kajian tentang peran produser dalam produksi media berbasis kampanye sosial dengan pendekatan *client-centered*.

